



Dinamika Organisasi Perempuan Islam: Aisyiyah dan Muslimat NU

Denisha Luthfiah Hermawan¹, Rezza Fauzi Muhammad Fahmi², Yuni Nur Anggraeni³, Fakhraini 'Afi Mufidah⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadlul Ulum Condong, Tasikmalaya, Indonesia

Article Info

Article History

Submitted 22-01-2026

Revised 23-02-2026

Accepted 25-03-2026

Published 29-04-2026

Keywords:

Aisyiyah,
Muslimat NU,
Critical
Historiography,
Digital Resilience,
Public Policy.

Correspondence:

denishaluthfiah31@gmail.com

Abstract

This study highlights how Islamic women's organizations respond to digital disruption and the challenges of religious conservatism in Indonesia. The primary focus is to analyze the ideological and structural transformation of Aisyiyah and Muslimat NU in negotiating historical identity with the demands of modernity. The research employs a qualitative approach through a critical historiographical method, encompassing digital source heuristics, source criticism, interpretation, and contemporary historiography. Findings reveal a shift from domestic roles to strategic public engagement through enhanced digital resilience, independent philanthropy, and public policy advocacy such as the TPKS Law. The novelty of this research lies in its post-pandemic comparative-synchronic analysis, examining the use of collective memory as an instrument for social innovation. The policy implications of these findings emphasize the importance of the government positioning both organizations as strategic partners in formulating social policy and religious moderation. Theoretically, this study contributes to the repositioning of Islamic women's historiography as active subjects in the history of digital civilization in Indonesia.

Penelitian ini menyoroti bagaimana organisasi perempuan Islam merespons disrupsi digital dan tantangan konservatisme keagamaan di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah menganalisis transformasi ideologi dan struktural Aisyiyah dan Muslimat NU dalam menegosiasikan identitas historis dengan tuntutan modernitas. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan historiografi kritis yang meliputi tahapan heuristik sumber digital, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran peran dari ranah domestik ke ranah publik strategis melalui penguatan resiliensi digital, kemandirian filantropi, dan advokasi kebijakan publik seperti UU TPKS. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif-sinkronik pascapandemi yang membedah penggunaan memori kolektif sebagai instrumen inovasi sosial. Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan pentingnya pemerintah menjadikan kedua organisasi tersebut sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan sosial dan moderasi beragama. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada reposisi historiografi perempuan Islam sebagai subjek aktif dalam sejarah peradaban digital di Indonesia.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan gerakan perempuan Islam di Indonesia mencerminkan interaksi yang khas antara ajaran keagamaan, semangat kebangsaan, dan arus modernitas yang turut membentuk karakter masyarakat sipil masa kini. Dalam konteks ini, Aisyiyah yang berafiliasi dengan Muhammadiyah serta Muslimat NU yang berada di bawah Nahdlatul Ulama tidak dapat dipandang semata sebagai organisasi pendukung. Keduanya justru memainkan peran strategis sebagai pelaku utama dalam penguatan modal sosial sekaligus pengembangan kapasitas intelektual masyarakat.

Dari perspektif teoretis, gerakan ini dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari agensi perempuan yang beroperasi dalam kerangka religiusitas, sekaligus menantang pandangan dikotomis Barat yang kerap memisahkan antara feminisme dan Islam (Mahmood, 2021). Jika ditinjau secara historis, perjalanan kedua organisasi tersebut memperlihatkan bahwa ruang publik di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat sekuler. Sebaliknya, ia diwarnai oleh praktik-praktik keagamaan yang berkembang menjadi kekuatan penting dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi (Hasan, 2022).

Dalam situasi kekinian, Aisyiyah dan Muslimat NU dihadapkan pada dua tantangan besar sekaligus, yakni laju digitalisasi yang semakin cepat dan menguatnya konservatisme keagamaan di ruang siber. Fenomena ini memaksa organisasi perempuan Islam untuk melakukan renegotiasi identitas di tengah perebutan otoritas keagamaan di ruang digital (Nisa, 2022). Secara kuantitatif, partisipasi perempuan dalam struktur organisasi memang mengalami peningkatan. Namun demikian, upaya untuk mengubah besarnya basis massa tersebut menjadi kekuatan yang mampu mendorong kebijakan publik yang progresif masih terbentur oleh kuatnya struktur patriarki yang terinternalisasi dalam lembaga keagamaan (Nurlaelawati & Arimbi, 2021).

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terciptanya sinergi kuat antara dakwah konvensional dan adaptasi teknologi untuk menjawab isu-isu krusial seperti *stunting*, kekerasan terhadap perempuan, dan kemandirian ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akses dan literasi teknologi yang signifikan. Hal ini sering kali menghambat penyebaran nilai-nilai Islam moderat di tengah masifnya penyebaran narasi radikal di ruang siber (Pratama, 2023). Kesenjangan ini menciptakan hambatan bagi organisasi untuk mentransformasikan nilai-nilai organisasi ke dalam ekosistem digital secara merata (Fahmi et al., 2024).

Kesenjangan antara visi emansipatif organisasi dengan praktik lapangan sering kali berakar pada interpretasi teks keagamaan yang masih terjebak dalam paradigma domestikasi di beberapa lapisan. Meskipun secara formal kedua organisasi ini telah mengadopsi narasi kesetaraan, dalam tataran implementasi, kepemimpinan perempuan sering kali masih dibatasi pada isu-isu "keperempuanan" tradisional (Fauzia & Aziz, 2022). Identifikasi penyebab masalah ini mengarah pada kuatnya pengaruh budaya patriarki yang terinternalisasi dalam struktur organisasi induk, yang terkadang masih memandang gerakan perempuan sebagai entitas komplementer daripada mitra sejajar dalam pengambilan keputusan strategis (Nurlaelawati & Arimbi, 2021). Hal ini menciptakan tantangan bagi Aisyiyah dan Muslimat NU untuk mendefinisikan kembali identitas mereka di tengah arus globalisasi yang menuntut transparansi.

Penelitian ini membahas permasalahan pada dinamika organisasi dalam satu dekade terakhir dengan penekanan pada strategi adaptasi struktural dan ideologis di tengah transisi menuju masyarakat digital. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana narasi Islam berkemajuan (Aisyiyah) dan Islam Nusantara (Muslimat NU) dioperasionalkan dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Tinjauan kritis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai Aisyiyah dan Muslimat NU sering kali terjebak pada narasi dikotomis antara modernis dan tradisional yang statis (Nisa, 2022). Penelitian lainnya menyoroti peran edukasi, namun kurang mengeksplorasi bagaimana taktik digital memengaruhi kohesi internal organisasi secara mendalam. Sementara itu, ada yang fokus pada filantropi, tetapi belum menyentuh aspek negosiasi identitas sosiopolitik dalam merespons kebijakan negara terbaru (Rohmani, 2024).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif-sinkronik yang membedah mekanisme "resiliensi digital" dan "dakwah transformatif" kedua organisasi dalam periode transisi pascapandemi. Berbeda dengan studi sejarah konvensional yang cenderung retrospektif pada masa kolonial, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah kontemporer untuk menangkap fenomena mengenai bagaimana memori kolektif organisasi digunakan sebagai alat legitimasi untuk melakukan inovasi sosial saat ini (Hidayah & Mu'ti, 2025). Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori ekologi media ke dalam kerangka historiografi untuk melihat perubahan pola komunikasi organisasi dari model hierarki ke model jejaring.

Hal ini penting untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan perempuan diperebutkan dan ditegakkan kembali di ruang digital (Pratama, 2023).

Masalah utama yang diidentifikasi adalah bagaimana Aisyiyah dan Muslimat NU menavigasi identitas historis mereka untuk tetap relevan dalam menjawab tantangan sosiopolitik dan teknologi di Indonesia masa kini. Terdapat ketegangan antara mempertahankan tradisi organisasi yang telah berusia seabad dengan keharusan melakukan dekonstruksi terhadap praktik-praktik lama yang tidak lagi kompatibel dengan kebutuhan generasi muda Muslim (Zuhri & Rosyid, 2024). Fenomena ini diperumit oleh posisi kedua organisasi sebagai pilar stabilitas negara, yang sering kali menuntut mereka untuk bersikap pragmatis dalam menghadapi isu-isu sensitif yang melibatkan otoritas politik (Yakin & Anwar, 2022). Kegagalan dalam melakukan adaptasi ini berisiko mengakibatkan hilangnya relevansi organisasi di mata konstituen muda yang lebih aktif di komunitas virtual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana dinamika transformasi ideologi dan struktural Aisyiyah dan Muslimat NU dalam merespons isu-isu sosiopolitik kontemporer? Kedua, sejauh mana strategi adaptasi digital memengaruhi pola kepemimpinan dan efektivitas dakwah kedua organisasi tersebut? Ketiga, bagaimana kontribusi sejarah kolektif kedua organisasi ini dalam membentuk diskursus moderasi beragama di Indonesia pada level global? Pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk menggali lebih dalam melampaui permukaan deskriptif, menuju analisis sosiologi-sejarah yang lebih komprehensif (Latief & Nashir, 2024).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses dialektika antara tradisi dan modernitas dalam tubuh Aisyiyah dan Muslimat NU serta dampaknya terhadap ketahanan sosial bangsa. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk memetakan inovasi strategis yang dilakukan kedua organisasi dalam mengatasi hambatan struktural dan kultural di era disrupsi. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah historiografi Islam di Indonesia dengan perspektif gender yang lebih dinamis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan di tingkat organisasi maupun pemerintah dalam merancang program pemberdayaan perempuan yang berbasis pada nilai-nilai religius (Kurniawati & Wahid, 2023).

Signifikansi penelitian ini juga terletak pada upayanya untuk mendekonstruksi narasi bahwa gerakan perempuan Islam bersifat reaktif. Sebaliknya, penelitian ini

berargumen bahwa Aisyiyah dan Muslimat NU adalah agen proaktif yang secara konsisten melakukan "ijtihad sosial" untuk menjawab problematika kemanusiaan universal (Muzakki & Ridho, 2022). Dengan melihat sejarah bukan sebagai artefak statis melainkan sebagai proses yang terus menjadi, penelitian ini memosisikan kedua organisasi sebagai subjek sejarah yang menentukan arah masa depan peradaban Islam di Indonesia. Integrasi antara data empiris terbaru dan kerangka teori historiografi kritis diharapkan mampu memberikan gambaran yang jernih mengenai masa depan gerakan perempuan Islam (Arifianto, 2021).

Sebagai penutup bagian pendahuluan, penting untuk ditegaskan bahwa keberhasilan Aisyiyah dan Muslimat NU dalam mempertahankan eksistensi mereka selama lebih dari satu abad merupakan bukti fleksibilitas doktrinal yang kuat. Penelitian ini tidak hanya akan memotret keberhasilan tersebut, tetapi juga akan menyoroti tantangan-tantangan internal yang sering kali terabaikan dalam narasi resmi organisasi. Dengan demikian, artikel ini akan menyajikan perspektif yang berimbang, kritis, dan analitis mengenai peran strategis perempuan dalam membentuk narasi Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan di panggung dunia (Baidhowi & Qomaruddin, 2025). Melalui pendekatan ini, urgensi penelitian untuk meninjau kembali arah pergerakan perempuan Islam di tengah turbulensi global menjadi semakin nyata.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif-deskriptif dengan pendekatan historiografi kritis untuk membedah transformasi Aisyiyah dan Muslimat NU. Dalam pelaksanaannya, metode penelitian yang diterapkan adalah studi dokumen kontemporer dan kritik sumber digital. Instrumen penelitian utama dalam studi ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dibantu dengan panduan klasifikasi data berdasarkan tema sosiopolitik dan adaptasi teknologi.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui penelusuran arsip digital, dokumen resmi organisasi, serta diskursus publik di media sosial resmi kedua organisasi selama periode pascapandemi. Sumber-sumber tersebut kemudian diverifikasi melalui teknik triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas narasi sejarah yang direkonstruksi. Proses ini memungkinkan penemuan fakta-fakta sistematis mengenai bagaimana kedua organisasi tersebut merespons dinamika disrupsi secara sinkronik.

Prosedur penelitian ini mengikuti empat tahapan metodologis utama yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, peneliti menghimpun data primer dan sekunder melalui teknik penelusuran data daring (*online data tracing*) pada situs resmi organisasi, repositori jurnal ilmiah bereputasi, serta arsip digital yang dipublikasikan secara terbuka oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Data primer yang diakses meliputi dokumen digital Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), risalah muktamar elektronik, dan pernyataan resmi tokoh organisasi. Sumber sekunder diperoleh melalui telaah terhadap artikel jurnal ilmiah, buku teks digital (*e-books*), dan laporan penelitian dari lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas diskursus akademik (Garraghan, 2021).

Setelah data digital terkumpul, dilakukan tahap kritik sumber yang mencakup kritik eksternal untuk menguji otentisitas serta integritas metadata dokumen digital, serta kritik internal untuk menguji kredibilitas isi dan objektivitas informasi yang terkandung di dalamnya (Gottschalk, 2022). Fakta-fakta digital yang telah terverifikasi kemudian disintesis melalui tahap interpretasi analitis guna melihat keterkaitan antara kebijakan organisasi dengan konteks sosial-politik di Indonesia (Daliman, 2021). Tahap akhir adalah historiografi, yakni penyusunan narasi sejarah yang logis dan argumentatif dalam bentuk artikel ilmiah yang sistematis. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*researcher as instrument*) yang didukung oleh matriks klasifikasi data sejarah digital.

Analisis data dilakukan secara tematik dan komparatif dengan mengklasifikasikan data berdasarkan tema besar seperti resiliensi ideologi, agensi perempuan, dan adaptasi digital, kemudian membandingkan titik temu (*convergence*) serta perbedaan (*divergence*) antara strategi pergerakan Aisyiyah dan Muslimat NU (Miles et al., 2020). Untuk menjamin kredibilitas, validitas, dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber digital dan triangulasi teori. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari situs resmi organisasi dengan laporan media massa daring yang kredibel serta perspektif peneliti independen dalam literatur akademik terkini (Creswell & Poth, 2021). Prosedur ini memastikan bahwa meskipun penelitian dilakukan sepenuhnya melalui akses internet tanpa observasi lapangan fisik, seluruh temuan tetap bersifat objektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat direplikasi secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Ideologi: Antara Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Aisyiyah dan Muslimat NU telah melakukan redefinisi ideologis yang signifikan dalam merespons dinamika sosial kontemporer. Aisyiyah, melalui bingkai "Islam Berkemajuan", menggeser fokus gerakannya dari sekadar pemberantasan TBC (Tahayul, Bid'ah, Churafat) menuju penguatan teologi perwalian (*wilayah*) yang memberikan ruang kepemimpinan perempuan di ranah publik (Latief & Nashir, 2024). Data digital dari risalah Muktamar Muhammadiyah menunjukkan peningkatan alokasi program pemberdayaan ekonomi perempuan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, Muslimat NU melalui paradigma "Islam Nusantara" memperkuat agensi perempuan melalui pelestarian tradisi yang diadaptasikan dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua organisasi tidak lagi memandang tradisi dan modernitas sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan sebagai instrumen dialektis untuk memperkuat posisi tawar perempuan dalam struktur sosial (Hidayah & Mu'ti, 2025).

Analisis terhadap data digital menunjukkan bahwa faktor utama penggerak transformasi ini adalah kebutuhan untuk menjawab krisis identitas di kalangan generasi muda Muslim. Berbeda dengan temuan lainnya, yang menyebutkan bahwa gerakan perempuan Islam cenderung konservatif dalam isu politik, data terbaru menunjukkan bahwa Aisyiyah dan Muslimat NU secara aktif melakukan lobi kebijakan terkait UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Nisa, 2022). Hal ini menunjukkan adanya perluasan spektrum gerakan dari ranah domestik-edukatif ke ranah advokasi-transformatif. Interpretasi sosiologis terhadap temuan ini mengarah pada teori agensi kesalehan (*pious agency*), di mana perempuan Muslim menggunakan otoritas keagamaan mereka untuk mendekonstruksi tafsir patriarki tanpa harus keluar dari bingkai ortodoksi agama (Mahmood, 2021). Keterlibatan Aisyiyah dan Muslimat NU dalam ruang publik tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik Muslim di Indonesia yang terus dinamis dalam menegosiasikan kepentingan agama dan negara (Syamsuddin, 2022).

Pergeseran peran Aisyiyah dan Muslimat NU dari ranah domestik ke ranah publik merupakan bentuk nyata dari upaya mendekonstruksi peran sosial yang selama ini membelenggu perempuan. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa pemahaman yang jelas mengenai perbedaan seks dan gender sangat diperlukan untuk

mengidentifikasi ketidakadilan struktural yang sering kali dianggap sebagai kodrat biologis, padahal merupakan konstruksi sosial yang dinamis (Fahmi, 2017). Dengan pemahaman ini, kedua organisasi mampu memposisikan agensi perempuan sebagai subjek aktif dalam perubahan sosial tanpa menghilangkan identitas keagamaannya.

2. Strategi Resiliensi Digital dan Dakwah Transformatif

Data penelusuran daring pada kanal komunikasi resmi kedua organisasi mengungkapkan pola adaptasi teknologi yang berbeda namun konvergen. Muslimat NU lebih menekankan pada pemanfaatan media sosial untuk penguatan kohesi sosial dan "ngaji *online*" yang bersifat massal, sementara Aisyiyah lebih fokus pada digitalisasi sistem filantropi dan manajemen organisasi berbasis data. Efektivitas dakwah digital ini terbukti mampu menjangkau segmen milenial yang sebelumnya terfragmentasi oleh narasi hijrah yang radikal (Pratama, 2023). Temuan ini memperluas studi (Smith & Hefner, 2023) dengan menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan medium, melainkan restrukturisasi otoritas keagamaan di mana tokoh perempuan kini memiliki panggung yang setara dengan ulama laki-laki di ruang siber.

Adaptasi teknologi yang dilakukan oleh Aisyiyah dan Muslimat NU dalam menyebarkan nilai-nilai Islam moderat merupakan respon strategis terhadap disrupsi informasi. Upaya ini selaras dengan pandangan bahwa era digital memberikan tantangan sekaligus peluang besar bagi keberlanjutan narasi sejarah peradaban Islam, di mana integrasi teknologi menjadi sarana krusial untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur kepada generasi muda secara lebih efektif (Fahmi et al., 2024). Strategi digital ini memastikan bahwa pesan-pesan organisasi tetap relevan di tengah arus informasi yang serba cepat.

Bagaimana adaptasi ini terjadi dapat dijelaskan melalui teori ekologi media, di mana Aisyiyah dan Muslimat NU berhasil menciptakan ekosistem digital yang memadukan konten moral-etik dengan solusi praktis atas problematika kehidupan sehari-hari. Namun, analisis terhadap data interaksi digital juga menemukan adanya tantangan berupa "celah literasi" antara pengurus pusat dan ranting di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan narasi besar organisasi terkadang terdistorsi oleh kearifan lokal yang masih bias gender. Meskipun demikian, keberhasilan kedua organisasi dalam mengonversi modal sosial tradisional menjadi modal digital merupakan capaian krusial yang menjamin keberlangsungan organisasi di era disrupsi informasi (Robinson, 2021).

3. Agensi Perempuan dalam Filantropi dan Kemandirian Ekonomi

Data hasil penelitian mengungkap bahwa sektor filantropi menjadi "jalan ketiga" bagi Aisyiyah dan Muslimat NU untuk menegaskan eksistensi sosiopolitik mereka. Aisyiyah melalui pengelolaan amal usaha di bidang kesehatan dan pendidikan telah menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang mandiri bagi anggotanya. Sementara itu, Muslimat NU melalui jaringan koperasi dan penguatan UMKM berbasis jemaah terbukti efektif dalam memitigasi dampak ekonomi pasca-krisis global (Rohmani, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa filantropi Islam yang dikelola perempuan memiliki karakteristik yang lebih inklusif dan berorientasi pada ketahanan keluarga. Analisis ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis komunitas yang menekankan pentingnya modal sosial dalam pengentasan kemiskinan (Kurniawati & Wahid, 2023).

Signifikansi dari gerakan ekonomi ini terletak pada kemampuannya untuk mendobrak ketergantungan organisasi pada pendanaan eksternal yang sering kali memiliki agenda politis tertentu. Kemandirian finansial yang dibangun oleh Aisyiyah dan Muslimat NU memberikan otonomi bagi mereka untuk menyuarakan isu-isu kritis tanpa tekanan struktural dari pihak luar (Fauzia & Aziz, 2022). Secara historiografis, keberhasilan ini merefleksikan keberlanjutan semangat kemandirian yang telah ditanamkan oleh para pendiri organisasi sejak awal abad ke-20. Hal ini membuktikan bahwa "ijtihad ekonomi" merupakan bagian integral dari sejarah pergerakan perempuan Islam di Indonesia yang terus bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman

4. Negosiasi Otoritas Keagamaan dan Ruang Publik

Penelitian ini menemukan adanya pergeseran cara pandang terhadap otoritas keagamaan perempuan di tubuh Muhammadiyah dan NU. Melalui forum-forum bahtsul masail (NU) dan Majelis Tarjih (Muhammadiyah) yang melibatkan perempuan, keputusan-keputusan keagamaan kini lebih responsif terhadap realitas kehidupan perempuan (Arifianto, 2021). Pergeseran ini bukan sekadar pemberian ruang formal, melainkan pengakuan intelektual terhadap kapasitas ulama perempuan dalam melakukan ijtihad. Fenomena ini memvalidasi teori "kesetaraan substansial" yang berargumen bahwa keadilan gender dalam Islam dapat dicapai melalui reinterpretasi teks-teks klasik dengan metodologi yang kritis dan kontekstual (Nurlaelawati & Arimbi, 2021).

Dampak dari negosiasi otoritas ini sangat terasa pada meningkatnya partisipasi perempuan dalam struktur pemerintahan dan lembaga non-pemerintah. Tokoh-tokoh dari Aisyiyah dan Muslimat NU kini banyak menduduki posisi strategis di tingkat nasional maupun internasional, yang membawa misi moderasi beragama dan perdamaian global (Yakin & Anwar, 2022). Namun, partisipasi ini sering kali masih dibayangi oleh ekspektasi sosial yang menuntut perempuan untuk tetap menjalankan peran domestik secara sempurna. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa proses negosiasi identitas masih berlangsung dinamis dan penuh tantangan kultural di tingkat akar rumput (Zuhri & Rosyid, 2024).

5. Moderasi Beragama dan Ketahanan Sipil Global

Dalam konteks moderasi beragama, Aisyiyah dan Muslimat NU memosisikan diri sebagai duta Islam moderat (*wasathiyah*) di kancah internasional. Analisis terhadap dokumen kerja sama internasional menunjukkan bahwa kedua organisasi terlibat aktif dalam isu-isu perubahan iklim dan perdamaian global melalui jaringan organisasi perempuan dunia. Temuan ini mendukung argumen bahwa filantropi Islam yang dikelola perempuan memiliki dampak yang lebih berkelanjutan pada stabilitas masyarakat sipil dibanding model filantropi konvensional (Muzakki & Ridho, 2022). Kekuatan historis sebagai organisasi yang lahir dari rahim pergerakan nasional memberikan legitimasi moral bagi mereka untuk menjadi penengah dalam konflik ideologi.

Penyebab dari kuatnya posisi tawar ini adalah konsistensi dalam menjaga independensi organisasi dari tarikan politik praktis yang ekstrem. Meskipun secara historis memiliki kedekatan dengan basis massa tertentu, Aisyiyah dan Muslimat NU tetap mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan elektoral (Baidhowi & Qomaruddin, 2025). Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pemerintah melibatkan secara lebih intensif organisasi-organisasi ini dalam perumusan kebijakan strategis nasional, tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai mitra kritis. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat paradigma historiografi yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif sejarah yang menentukan arah masa depan peradaban (Nurlaelawati & Arimbi, 2021).

6. Aktivisme Sosial-Politik: Advokasi Kebijakan dan Perlindungan Gen

Eksistensi Aisyiyah dan Muslimat NU dalam panggung sosiopolitik kontemporer telah bertransformasi dari gerakan berbasis dakwah menjadi kekuatan penekan (*pressure group*) yang signifikan dalam kebijakan publik. Kedua organisasi ini

tidak lagi sekadar menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang mengadvokasi isu-isu krusial, seperti implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan penguatan perlindungan anak di tingkat akar rumput. Melalui jaringan ranting yang tersebar hingga ke desa-desa, mereka mampu melakukan mobilisasi opini publik yang berbasis pada legitimasi agama, sehingga narasi perlindungan gender menjadi lebih diterima oleh masyarakat tradisional.

Strategi advokasi yang dilakukan cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan integratif dengan struktur otoritas keagamaan. Hal ini menciptakan model feminisme yang khas Indonesia, di mana tuntutan hak-hak perempuan disuarakan melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan yang moderat. Secara komparatif, gerakan perempuan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan gerakan feminisme di wilayah lain seperti Mesir. Jika gerakan di Indonesia lebih menekankan pada sinergi dengan institusi keagamaan besar, gerakan di wilayah lain sering kali bersifat lebih radikal dalam menantang struktur otoritas tradisional. Sebagaimana dianalisis dalam studi mengenai pemikiran Nawal El-Saadawi, dinamika gerakan perempuan sering kali lahir dari benturan antara kesadaran intelektual dengan realitas sosiopolitik yang represif (Pirdaus & Fahmi, 2025). Perbandingan ini mempertegas bahwa Aisyiyah dan Muslimat NU berhasil menciptakan model gerakan yang lebih inklusif, akomodatif terhadap budaya lokal, dan meminimalisir polarisasi ekstrem.

7. Tantangan Struktural dan Polarisasi Ideologis

Meskipun terdapat kemajuan pesat, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya hambatan struktural yang masih persisten di dalam organisasi. Dominasi narasi patriarki dalam struktur organisasi induk sering kali membuat keputusan strategis yang diambil oleh Aisyiyah atau Muslimat NU memerlukan validasi dari pimpinan laki-laki (Arimbi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan otoritas belum sepenuhnya tercapai di semua level kepemimpinan. Kesenjangan ini merupakan tantangan bagi masa depan historiografi perempuan Islam untuk terus menyuarakan pentingnya dekonstruksi struktural yang lebih radikal namun tetap berbasis nilai religius.

Selain itu, polarisasi ideologis di ruang siber memberikan tekanan tambahan bagi para aktivis perempuan Islam. Mereka sering kali terjepit di antara kelompok konservatif yang menuduh mereka terlalu liberal, dan kelompok liberal yang menganggap mereka kurang progresif (Hasan, 2022). Resiliensi dalam menghadapi

tekanan ganda ini menjadi bukti kekuatan mentalitas organisasi yang telah teruji secara historis. Kemampuan Aisyiyah dan Muslimat NU untuk tetap tegak di "jalan tengah" merupakan kontribusi besar bagi kohesi sosial bangsa Indonesia di tengah gelombang populisme agama global (Subarkah & Zakaria, 2024).

8. Masa Depan Gerakan Perempuan Islam

Sebagai sintesis dari temuan-temuan di atas, masa depan Aisyiyah dan Muslimat NU sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam melakukan regenerasi kepemimpinan yang adaptif terhadap nilai-nilai generasi Z. Keberhasilan transformasi digital harus diimbangi dengan penguatan literasi ideologis agar nilai-nilai dasar organisasi tidak luntur oleh arus informasi yang dangkal (Pratama, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa memori kolektif organisasi, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal simbolik yang sangat kuat untuk menggerakkan perubahan sosial yang lebih luas. Hal ini menepis anggapan bahwa organisasi keagamaan tua akan kehilangan relevansinya di zaman modern.

Kelebihan penelitian ini terletak pada pemanfaatan data digital terkini yang menangkap dinamika pascapandemi, sebuah periode yang belum banyak diulas dalam literatur sejarah konvensional. Namun, keterbatasan utama penelitian ini adalah ketergantungan pada sumber daring yang mungkin tidak merepresentasikan realitas di wilayah dengan akses internet terbatas. Studi masa depan perlu mengintegrasikan metode etnografi digital dengan observasi lapangan langsung untuk mendapatkan gambaran holistik (Kurniawati & Wahid, 2023). Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa Aisyiyah dan Muslimat NU tetap menjadi pilar utama ketahanan sosial Indonesia melalui kemampuan mereka melakukan "ijtihad organisasi" yang inklusif dan visioner (Muzakki & Ridho, 2022).

Akhirnya, studi ini menyimpulkan bahwa dinamika Aisyiyah dan Muslimat NU adalah bukti hidup bahwa Islam dan emansipasi perempuan tidak hanya kompatibel, tetapi juga saling memperkuat. Melalui strategi negosiasi yang cerdas, adaptasi teknologi yang masif, dan penguatan kemandirian ekonomi, kedua organisasi ini terus menuliskan sejarah baru yang menginspirasi gerakan perempuan Islam di seluruh dunia. Sejarah bukan lagi sekadar catatan tentang apa yang terjadi di masa lalu, melainkan sebuah laboratorium sosial untuk merancang masa depan peradaban yang lebih adil dan bermartabat (Latief & Nashir, 2024). Pergerakan mereka adalah cerminan dari wajah Islam Indonesia yang ramah, progresif, dan memberdayakan.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika organisasi Aisyiyah dan Muslimat NU merupakan manifestasi dari ijtihad sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman, di mana kedua organisasi berhasil melakukan negosiasi identitas antara nilai-nilai keagamaan tradisional-modernis dengan tuntutan emansipasi kontemporer. Tujuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi ideologi dan struktural yang terjadi bukan sekadar respons reaktif terhadap kebijakan negara, melainkan upaya proaktif dalam merebut otoritas keagamaan perempuan di ruang publik dan digital. Inti temuan ini menegaskan bahwa strategi resiliensi digital dan penguatan filantropi mandiri telah berhasil mengonversi modal sosial tradisional menjadi kekuatan sosiopolitik yang signifikan, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial bangsa di era disrupsi.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan gerakan perempuan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang tepat mengenai dekonstruksi peran gender. Dengan membedakan secara tajam antara kodrat biologis dan konstruksi sosial, Aisyiyah dan Muslimat NU mampu melakukan manuver gerakan yang tidak berbenturan dengan nilai dasar agama, namun tetap efektif mendobrak ketidakadilan struktural. Model gerakan ini menciptakan pola emansipasi yang harmonis, di mana perempuan Muslim tetap dapat menjaga muwah keagamaannya sembari mengambil peran kepemimpinan yang strategis dalam struktur sosial masyarakat secara inklusif.

Implikasi terhadap kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya bagi pemerintah dan lembaga negara untuk menempatkan Aisyiyah dan Muslimat NU sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan nasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan gender (seperti implementasi UU TPKS), moderasi beragama, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Kekuatan jaringan akar rumput kedua organisasi ini merupakan aset krusial bagi stabilitas masyarakat sipil global. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan mendekonstruksi historiografi gerakan perempuan yang selama ini cenderung domestik, menuju pengakuan atas agensi perempuan Islam sebagai subjek aktif sejarah kontemporer melalui perspektif sejarah digital yang kritis.

Strategi digital yang diterapkan membuktikan bahwa teknologi bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan instrumen krusial bagi keberlanjutan peradaban Islam di masa depan. Berbeda dengan pola gerakan perempuan di wilayah Timur Tengah yang

sering kali lahir dari polarisasi tajam antara intelektualisme dan realitas politik represif, gerakan di Indonesia menawarkan "jalan tengah" yang lebih akomodatif. Sinergi antara memori kolektif sejarah dengan literasi teknologi digital memungkinkan narasi moderasi tetap relevan bagi generasi muda. Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, sangat disarankan bagi peneliti mendatang untuk melakukan studi lapangan etnografis guna memverifikasi efektivitas kebijakan pusat di wilayah dengan keterbatasan akses digital. Selain itu, potensi pengembangan studi dapat diarahkan pada analisis komparatif lintas kawasan, seperti Asia Selatan atau Afrika Utara, untuk melihat pola divergensi agensi perempuan dalam konteks geopolitik yang berbeda, sehingga narasi sejarah perempuan Islam terus berkembang sebagai disiplin ilmu yang dinamis dan relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. R. (2021). The state of the 'moderate' Muslims: Indonesia's Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(3), 450–472.
- Arimbi, D. A. (2021). *Gender and Religious Leadership in Indonesia. Dalam Women's Agency in Muslim Societies*. Routledge.
- Assaad, R., & Krafft, C. (2021). *The Structure and Evolution of Employment in Egypt: 1998-2018*. Routledge.
- Aziz, M. A. (2023). Digital philanthropy and Islamic social finance in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 210–225.
- Baidhowi, A., & Qomaruddin, M. (2025). Global diplomacy of Islamic women's organizations: Aisyiyah and Muslimat NU on the world stage. *Journal of Islamic International Relations*, 13(1), 88–105.
- Burhanuddin, J. (2021). *Ulama Perempuan Indonesia: Otoritas dan Jaringan Intelektual*. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Daliman, A. (2021). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.
- Fahmi, R. F. M. (2017). Perbedaan seks dan gender. *Jurnal Artefak*, 4(1), 19–26.
- Fahmi, R. F. M. (2022). *Ilmu Politik Siyasah Para Tokoh Muslim*. Condong Press.
- Fahmi, R. F. M., Triana, A. N., & Qurrotunnisa, A. (2024). Tantangan dan peluang pembelajaran sejarah peradaban Islam di era digital. *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, 1.
- Fauzia, A., & Aziz, M. A. (2022). Islamic philanthropy and women's empowerment: A comparative study of Aisyiyah and Muslimat NU. *Journal of Muslim Philanthropy & Civil Society*, 6(2), 110–135.
- Garraghan, G. J. (2021). *A guide to historical method*. East-West Press.
- Gottschalk, L. (2022). *Understanding history: A primer of historical method* (Edisi ke-2). Knopf.
- Hasan, N. (2022). *Islamic conservatism in Indonesia: Dilemmas of religious authority and social transformation*. Oxford University Press.
- Hefner, R. W. (2021). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

- Hidayah, N., & Mu'ti, A. (2025). Progressive Islam and women's agency: Analyzing Aisyiyah's strategic role in modern Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 15(1), 45–67.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2024). *Laporan Tahunan Implementasi UU TPKS dan Peran Organisasi Masyarakat*.
- Kuntowijoyo. (2023). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Kurniawati, L., & Wahid, A. (2023). Grassroots movements and Islamic feminism: The case of Muslimat NU in rural Java. *Journal of Gender and Religion*, 19(4), 312–330.
- Latief, H., & Nashir, H. (2024). *Muhammadiyah and the trajectory of Islamic modernism in Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Mahmood, S. (2021). *Politics of piety: The Islamic revival and the feminist subject*. Princeton University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Muslimat NU. (2023). *Hasil-Hasil Muktamar dan Program Strategis Nasional Muslimat NU 2023-2026*.
- Muzakki, A., & Ridho, M. T. (2022). Social Ijtihad: How Aisyiyah and Muslimat NU redefine women's roles in public health. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(2), 245–278.
- Nashir, H. (2023). *Islam Berkemajuan: Dialektika Agama dan Modernitas*. Suara Muhammadiyah.
- Nisa, E. F. (2022). *Women in the Face of Islamic Conservatism in Indonesia*. Routledge.
- Nurholis, E., & Fahmi, R. F. M. (2025). Dinamika kehidupan nelayan Pangandaran: Transformasi sosial ekonomi dalam konteks negara maritim. *Jurnal Artefak*, 12(1), 147–158.
- Nurlaelawati, E., & Arimbi, D. A. (2021). Female religious authority in Indonesia: The fatwa of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI). *Journal of Islamic Law and Society*, 28(1), 1–29.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2024). *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah di Era Digital*.
- Pirdaus, A. D., & Fahmi, R. F. M. (2025). Gerakan dan pemikiran feminisme Nawal El-Saadawi di Mesir tahun (1952-2021). *Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 6(2), 341–356.

- Pratama, B. (2023). Digital dakwah and media ecology: Aisyiyah's transformation in the cyber era. *Journal of Media and Religion*, 22(3), 156–175.
- Robinson, K. (2021). *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. Routledge.
- Rohmani, S. (2024). Islamic philanthropy and economic resilience: The role of Muslimat NU cooperatives. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 10(1), 44–62.
- Smith, R., & Hefner, R. W. (2023). Education and social mobility: The historical impact of Aisyiyah and Muslimat NU schools. *Comparative Education Review*, 67(2), 201–224.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Syamsuddin, D. (2022). *The Dynamics of Muslim Politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- Yakin, A. U., & Anwar, S. (2022). Political pragmatism and religious identity: Aisyiyah and Muslimat NU in the national policy-making process. *Asian Journal of Political Science*, 30(2), 143–165.